

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Di Kabupaten Gianyar

Ni Luh Nyoman Ayu Gumi Anggreni¹, Ni Nyoman Ayu Suryandari², Made Laksmi Sena Hartini³

^{1,2,3}*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar*

Email: ayusuryandari@unmas.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the factors that affect the quality of local government financial reports, with a focus on the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) in Gianyar Regency. As part of the government agencies that manage financial affairs and regional assets, BPKAD has a crucial role in the implementation of regional autonomy. Local financial management is expected to be orderly, transparent, and accountable, reflecting a commitment to clean government. One of the main instruments in achieving these goals is local government financial statements. Financial statements not only serve as a tool of public accountability, but also as a source of information used for decision making and evaluation of organizational performance. The population in this study were all employees of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) in Gianyar Regency with a total of 313 employees. The sample in this was taken by purposive sampling method with a total of 45. The data analysis technique used in the study was multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that government accounting standards variables have a positive effect on the quality of local government financial reports, while the government internal control system, regional financial accounting system, level of education, and experience have no effect on the quality of local government financial reports.

Keywords: *quality of local government financial statements, government accounting standards, government internal control system, local financial accounting system, level of education, and experience.*

PENDAHULUAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan instansi pemerintahan yang memiliki unsur pelaksana urusan pemerintahan bergerak di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah salah satu dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Daerah Kabupaten Gianyar yang dikepalai oleh seorang Kepala Badan dengan dibantu oleh satu Sekretaris Badan dengan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian (Kasubbag) dan 6 (enam) Kepala Bidang. Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah tertuang dalam pasal 3 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 92 Tahun 2016 yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

Kualitas laporan keuangan merupakan persyaratan normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi dan penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan cerminan untuk mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik yang telah ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010, yaitu Informasi dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas apabila informasi tersebut memenuhi kriteria dalam akuntansi pemerintahan

seperti relevan (relevance), andal (reability), dapat dipahami (understandability) dan dapat di bandingkan (comparability).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas adalah laporan keuangan yang dihasilkan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dijelaskan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yang dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menurut Siahaan dan Simanjuntak (2020), Ardianto dan Eforis (2022), Angelicca (2019), Ikyarti dan Aprila (2019), serta Lynda, dkk. (2019) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siahaan dan Simanjuntak (2020), Lynda, dkk. (2019), Ikyarti dan Aprila (2019) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardianto dan Eforis (2022), Gustina (2021) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan bantuan komputer yang mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan berakhir pada pelaporan keuangan yang dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi yang berbasis akrual membutuhkan sebuah sistem akuntansi. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dibutuhkan dalam mengelola informasi akuntansi mulai dari proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta laporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, yang nantinya dapat membantu dalam memberikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dimana semakin baik dilakukannya SAKD maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pun menjadi semakin meningkat. Gustina (2021), Vidyasari dan Suryono (2021) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan Ardianto dan Eforis (2022) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain faktor-faktor di atas terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah yaitu tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tingkat pendidikan atau sering disebut dengan jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sukriani, dkk. (2018) menyatakan bahwa tingkat pendidikan dapat menjadi indikator yang menunjukkan derajat intelektualitas seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitas seseorang. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menurut Maghfiroh, dkk. (2022), Sukriani, dkk. (2018) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan Budiono, dkk. (2018) menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor lain berikutnya adalah pengalaman kerja. Pada hakikatnya pengalaman adalah pemahaman terhadap sesuatu yang dihayati dan dengan penghayatan serta mengalami sesuatu tersebut diperoleh pengalaman, keterampilan ataupun nilai yang menyatu pada potensi diri (Budiono, dkk. 2018). Seperti halnya pendidikan, pengalaman dalam bekerja akan meningkatkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Dengan adanya pengalaman kerja, maka tingkat kesalahan dalam penulisan laporan keuangan akan lebih kecil (Maghfiroh, dkk. 2022). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menurut Sukriani, dkk. (2018) dan Maulid, dkk. (2022), menyatakan bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan Maghfiroh, dkk. (2022) menyatakan bahwa pengalaman berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan, dan Budiono, dkk. (2018) menyatakan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian pada penelitian sebelumnya maka penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Gianyar. Kabupaten Gianyar dipilih sebagai lokasi penelitian karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar telah berhasil meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah berhasil menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun anggaran 2022. Penghargaan WTP merupakan penghargaan ke-9 kali secara berturut-turut yang diraih Kabupaten Gianyar (BPKAD, 2023).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Gianyar”.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan merupakan dasar teoritis yang mendasari praktik bisnis perusahaan selama bertahun-tahun yang berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan teori organisasi. Teori keagenan (Agency Theory) mengungkapkan adanya hubungan antara agen dan principal. Agen dikontrak untuk melakukan tugas khusus untuk prinsipal bersama dengan tanggung jawab untuk tugas yang diberikan. Prinsipal memiliki kewajiban untuk memberi penghargaan kepada agen untuk layanan yang diberikan oleh agen. Meskipun terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal dan menyebabkan terjadinya konflik.

Prinsipal dan agen sama-sama ingin memaksimalkan keuntungan serta menghindari risiko (Belkaouli, 2019).

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Semakin baik penerapan Standar Akuntansi Pemerintah maka akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja baik, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan semakin berkualitas untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan.

Penelitian mengenai pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah dilakukan oleh Siahaan dan Simanjuntak (2020), Ardianto dan Eforis (2022), Angelicca (2019), Ikyarti dan Aprila (2019), serta Lynda, dkk. (2019) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan teori beserta uraian diatas maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H1 : Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

SPIP terdiri dari lima unsur sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan Pengendalian Intern. Penelitian mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah dilakukan oleh Siahaan dan Simanjuntak (2020), Ikyarti dan Aprila (2019), serta Lynda, dkk. (2019) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan teori beserta uraian diatas maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H2 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), lemahnya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat menyebabkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan (Fauziyah, 2019). Penelitian mengenai pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah dilakukan oleh Gustina (2020), Jauhari, dkk. (2021), Vidyasari dan Suryono (2021) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif. Berdasarkan teori beserta uraian diatas maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H3 : Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia tingkat pendidikan adalah tahap yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik, keluasan bahan pengajaran, dan tujuan pendidikan yang dicantumkan dalam kurikulum. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia no 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tingkat pendidikan atau disebut juga jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan-tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Sukriani, dkk. (2018) menyatakan bahwa

tingkat pendidikan dapat menjadi indikator yang menunjukkan derajat intelektualitas seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitas seseorang. Penelitian mengenai pengaruh Pendidikan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah dilakukan oleh Maghfiroh, dkk. (2022) dan Sukriani, dkk. (2022) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan teori beserta uraian diatas maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H4 : Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Pengalaman Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sukriani, dkk. (2018) menyatakan bahwa Setiap orang yang memiliki pengalaman yang luas akan lebih mudah berinteraksi dalam melaksanakan pekerjaannya baik di organisasi, perusahaan, maupun juga di pemerintahan. Dengan demikian orang-orang yang berpengalaman mempunyai peluang yang lebih besar untuk mengerjakan tugas-tugas perusahaan dengan baik dibandingkan dengan orang yang belum berpengalaman (Suryantini, dkk, 2021). Pengalaman dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah dilakukan oleh Sukriani, dkk. (2018), Suryantini, dkk (2021), dan Maulid, dkk. (2022) yang menyatakan bahwa Pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Berdasarkan teori beserta uraian diatas maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H5 : Pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian saat ini berfokus pada hubungan standar akuntansi pemerintah (SAP), sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), pendidikan dan pengalaman terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Gianyar. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 Kualitas laporan keuangan dapat diukur dengan indikator antara lain:

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat Dibandingkan
- d. Dapat Dipahami

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Kuesioner untuk mengukur variabel Standar Akuntansi Pemerintah dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian Alfa (2022). Indikator untuk variabel ini terdiri dari 12 pernyataan yaitu:

- a. 1 buah pernyataan Penyajian Laporan Keuangan.
- b. 1 buah pernyataan Laporan Realisasi Anggaran.
- c. 1 buah pernyataan Laporan Arus Kas.

- d. 1 buah pernyataan Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. 1 buah pernyataan Akuntansi Persediaan.
- f. 1 buah pernyataan Akuntansi Investasi.
- g. 1 buah pernyataan Akuntansi Aset Tetap.
- h. 1 buah pernyataan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- i. 1 buah pernyataan Akuntansi Kewajiban.
- j. 1 buah pernyataan Koreksi Kesalahan
- k. 1 buah pernyataan Laporan Keuangan Konsolidasian.
- l. 1 buah pernyataan Laporan Operasional.

Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah unsur sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia yang mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara. Berikut unsur-unsur SPIP tersebut beserta indikatornya (PP No.60 Tahun 2008):

- a. Lingkungan Pengendalian
- b. Penilaian Risiko
- c. Kegiatan Pengendalian
- d. Informasi dan komunikasi
- e. Pemantauan Pengendalian Intern

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, menurut permendagri Nomor 64 tahun 2013, Sistem akuntansi keuangan daerah atau serangkaian prosedur sistematis penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk menyelesaikan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. Indikator Sistem Akuntansi Keuangan menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi:

- a. Pencatatan
- b. Pengikhtisaran
- c. Pelaporan

Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek-objek tertentu dan spesifik. Pengetahuan tersebut diperoleh secara formal yang berakibat individu mempunyai pola pikir dan perilaku sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya. Maghfiroh, dkk. (2022) dan Putri (2021) menyatakan bahwa tingkat pendidikan, indikatornya yaitu :

- a. Latar Belakang Pendidikan
- b. Strata Pendidikan
- c. Pendidikan Dilakukan Secara Periodik.

Salwa (2021) menyatakan bahwa “pengalaman memunculkan potensi seseorang. Potensi penuh akan muncul bertahap seiring berjalannya waktu sebagai tanggapan terhadap bermacam-macam pengalaman”. Jadi sesungguhnya yang penting diperhatikan dalam hubungan tersebut adalah kemampuan seseorang untuk belajar dari pengalamannya, baik pengalaman manis maupun pahit. Maka pada hakikatnya pengalaman adalah pemahaman terhadap sesuatu yang dihayati dan dengan penghayatan serta mengalami sesuatu tersebut diperoleh pengalaman, ketrampilan ataupun nilai yang menyatu pada potensi diri. Menurut penelitian yang dilakukan Maghfiroh, dkk. (2022) menyatakan bahwa Pengalaman kerja, indikatornya yaitu :

- a. Jangka Waktu Bekerja
- b. Bidang Pengalaman Kerja
- c. Manfaat Pengalaman Kerja di Bidang Keuangan atau Akuntansi.

Analisis regresi linier berganda adalah metode yang digunakan. Berikut ini dapat digunakan untuk membuat model regresi berganda dalam penelitian ini:

$$KLK = \alpha + \beta_1SAP + \beta_2SPIP + \beta_3SAKD + \beta_4TP + \beta_5P + e \dots\dots\dots (1)$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Indikator	Koefisien Korelasi	Nilai Sig	Keterangan
1	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	X1.1	0,792	0,001	Valid
		X1.2	0,874	0,001	Valid
		X1.3	0,915	0,001	Valid
		X1.4	0,841	0,001	Valid
		X1.5	0,776	0,001	Valid
		X1.6	0,944	0,001	Valid
		X1.7	0,944	0,001	Valid
		X1.8	0,844	0,001	Valid
		X1.9	0,895	0,001	Valid
		X1.10	0,945	0,001	Valid
		X1.11	0,945	0,001	Valid
		X1.12	0,918	0,001	Valid
2	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	X2.1	0,788	0,001	Valid
		X2.2	0,863	0,001	Valid
		X2.3	0,512	0,001	Valid
		X2.4	0,676	0,001	Valid
		X2.5	0,825	0,001	Valid
		X2.6	0,844	0,001	Valid
		X2.7	0,848	0,001	Valid
		X2.8	0,735	0,001	Valid
		X2.9	0,846	0,001	Valid
		X2.10	0,793	0,001	Valid
		X2.11	0,740	0,001	Valid
3	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	X3.1	0,788	0,001	Valid
		X3.2	0,730	0,001	Valid
		X3.3	0,763	0,001	Valid
		X3.4	0,823	0,001	Valid
		X3.5	0,890	0,001	Valid
		X3.6	0,801	0,001	Valid
		X3.7	0,890	0,001	Valid
		X3.8	0,820	0,001	Valid
		X3.9	0,922	0,001	Valid
		X3.10	0,810	0,001	Valid
		X3.11	0,790	0,001	Valid
4	Tingkat Pendidikan	X4.1	0,729	0,001	Valid
		X4.2	0,895	0,001	Valid
		X4.3	0,553	0,001	Valid
		X4.4	0,765	0,001	Valid

		X4.5	0.861	0,001	Valid
		X4.6	0.903	0,001	Valid
		X4.7	0.788	0,001	Valid
5	Pengalaman	X5.1	0.689	0,001	Valid
		X5.2	0.787	0,001	Valid
		X5.3	0.798	0,001	Valid
		X5.4	0.814	0,001	Valid
		X5.5	0.855	0,001	Valid
		X5.6	0.843	0,001	Valid
		X5.7	0.575	0,001	Valid
		X5.8	0.879	0,001	Valid
		X5.9	0.897	0,001	Valid
		X5.10	0.785	0,001	Valid
6	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Y.1	0.595	0,001	Valid
		Y.2	0.310	0,049	Valid
		Y.3	0.527	0,001	Valid
		Y.4	0.474	0,002	Valid
		Y.5	0.522	0,001	Valid
		Y.6	0.502	0,001	Valid
		Y.7	0.457	0,003	Valid
		Y.8	0.700	0,001	Valid
		Y.9	0.510	0,001	Valid

Berdasarkan hasil pengujian di atas, seluruh instrument pernyataan indikator penelitian memiliki nilai diatas 0,03, dan nilai signifikasi dibawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator yang digunakan telah valid dan lulus uji validitas.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach alpha	Keterangan
1	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0.973	Reliabel
2	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0.928	Reliabel
3	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0.947	Reliabel
4	Tingkat Pendidikan	0.882	Reliabel
5	Pengalaman	0.928	Reliabel
6	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0.936	Reliabel

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's alpha di atas 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel telah lulus uji reliabilitas.

Analisis Linier Berganda

Tabel 3
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	6,135	4,339		1,414	0,166
	SAP	0,678	0,116	0,931	5,864	0,001
	SPIP	0,108	0,232	0,104	0,465	0,645
	SAKD	-0,004	0,217	-0,004	-0,020	0,984
	TP	-0,165	0,179	-0,140	-0,920	0,364
	P	-0,046	0,115	-0,046	-0,398	0,693

a. Dependent Variable: KLK

Berdasarkan hasil regresi seperti yang disajikan pada Tabel 3 diatas, maka dapat dibuat persamaan struktural sebagai berikut :

$$KLK = 6,135 + 0,678SAP + 0,108SPIP - 0,004SAKD - 0,165TP - 0,046P \dots (2)$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda tersebut dapat dijelaskan koefisien-koefisiennya sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 6,135, artinya jika variabel SAP, SPIP, SAKD, TP, dan P bernilai 0 maka nilai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLK) sebesar 6,135.
- 2) Nilai koefisien variabel SAP bernilai positif 0,678 dengan nilai signifikan 0,001 ($0,001 < 0,05$), artinya jika penerapan standar akuntansi pemerintah naik satu satuan maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah naik sebesar 0,678 dengan asumsi semua variabel bebas lainnya adalah konstan.
- 3) Nilai koefisien variabel SPIP bernilai positif 0,108 dengan nilai signifikan 0,645 ($0,645 > 0,05$), artinya SPIP tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
- 4) Nilai koefisien variabel SAKD bernilai negatif 0,004 dengan nilai signifikan 0,984 ($0,984 > 0,05$), artinya SAKD tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
- 5) Nilai koefisien variabel TP bernilai negatif 0,165 dengan nilai signifikan 0,364 ($0,364 > 0,05$), artinya TP tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
- 6) Nilai koefisien variabel P bernilai negatif 0,046 dengan nilai signifikan 0,693 ($0,693 > 0,05$), artinya P tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		41
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,92709596
Most Extreme Differences	Absolute	0,261
	Positive	0,261
	Negative	-0,175
Test Statistic		0,261
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200
Monte Carlo Sig. (2-tailed).	Sig.	0,327

99% Confidence Interval	Lower Bound	0,315
	Upper Bound	0,339

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa Asymp. Sig. (2 sisi) 0,200, sejak Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari nilai alpha 0,05 ($0,200 > 0,05$), sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa model persamaan regresi berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Tolerance	Statistic VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	6,135	4,339		1,414	0,166		
SAP	0,678	0,116	0,931	5,864	0,001	0,269	3,718
SPIP	0,108	0,232	0,104	0,465	0,645	0,134	7,447
SAKD	-0,004	0,217	-0,004	-0,020	0,984	0,133	7,501
TP	-0,165	0,179	-0,140	-0,920	0,364	0,292	3,423
P	-0,046	0,115	-0,046	-0,398	0,693	0,511	1,957

a. Dependent Variable: KLK

Dari Tabel 5 terlihat bahwa menunjukkan nilai tolerance untuk setiap variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 ini berarti model persamaan regresi bebas dari multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,829	29,162		0,097	0,923
SAP	-0,398	0,777	-0,156	-0,513	0,611
SPIP	2,125	1,561	0,585	1,362	0,182
SAKD	-1,011	1,459	-0,299	-0,693	0,493
TP	-1,803	1,205	-0,436	-1,497	0,143
P	0,491	0,775	0,140	0,633	0,531

a. Dependent Variable: ABRES

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Uji F

Tabel 7
Hasil Uji Statistik F
 ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	119,684	5	23,937	11,019	0,001 ^b
Residual	143,367	66	2,172		
Total	263,051	71			

a. Dependent Variable: KLK

b. Predictors: (Constant), P, TP, SAKD, SAP, SPIP

Hasil uji signifikansi simultan (Uji F) diperoleh nilai signifikansi F sebesar 0,001. Nilai Signifikansi $0,001 < 0,05$ mengindikasikan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Tingkat Pendidikan (TP), Pengalaman (P) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLK), maka model layak digunakan untuk uji selanjutnya.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,873a	0,763	0,729	0,873a	2,06015

a. Predictors: (Constant), P, TP, SAKD, SAP, SPIP

b. Dependent Variable: KLK

Berdasarkan Tabel 8, besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditunjukkan oleh nilai determinasi total (Adjusted R Square) sebesar 0,729 mempunyai arti bahwa sebesar 72,9% variabel *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLK)* mampu dijelaskan oleh variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD),

Tingkat Pendidikan (TP), Pengalaman (P) sedangkan sisanya sebesar 27,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Uji t

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat disimpulkan yaitu:

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memiliki nilai koefisien sebesar 0,678 (positif) dan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari α 0,05 ($0,001 < 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLK). Sehingga H1 dapat diterima.
2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) memiliki nilai koefisien sebesar 0,108 (positif) dan nilai signifikansi sebesar 0,645 lebih besar dari α 0,05 ($0,645 > 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLK). Sehingga H2 ditolak.
3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memiliki nilai koefisien sebesar -0,004 (negatif) dan nilai signifikansi sebesar 0,984 lebih besar dari α 0,05 ($0,984 > 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLK). Sehingga H3 ditolak.
4. Tingkat Pendidikan (TP) memiliki nilai koefisien sebesar -0,165 (negatif) dan nilai signifikansi sebesar 0,364 lebih besar dari α 0,05 ($0,364 > 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial Tingkat Pendidikan (TP) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLK). Sehingga H4 ditolak.
5. Pengalaman (P) memiliki nilai koefisien sebesar -0,046 (negatif) dan nilai signifikansi sebesar 0,693 lebih besar dari α 0,05 ($0,693 > 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pengalaman (P) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLK). Sehingga H5 ditolak

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLK). Ini berarti mendukung hipotesis pertama (H1). Standar Akuntansi merupakan suatu bentuk pedoman yang harus dipatuhi dan sebagai patokandalam melaksanakan fungsi akuntansi dalam suatu organisasi. Demikian tujuan dari penerapan standar akuntansi adalah mendorong agar aktivitas akuntansi dapat berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan pedoman standar yang ditetapkan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Semakin baik penerapan Standar Akuntansi Pemerintah maka akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja baik, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan semakin berkualitas untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Siahaan dan Simanjuntak (2020), Ardianto dan Eforis (2022), Angelicca (2019), Ikyarti dan Aprila (2019), serta Lynda, dkk. (2019) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) memiliki nilai koefisien sebesar 0,108 (positif) dan nilai signifikansi sebesar 0,645 lebih besar dari α 0,05 ($0,645 > 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLK). Ini berarti menolak hipotesis kedua (H2). SPI secara lengkap dan menyeluruh terhadap sistem akuntansi tidak mempengaruhi penyusunan laporan keuangan. Penerapan SPI secara lengkap dan menyeluruh belum sepenuhnya mengurangi pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi. Didalam pelaksanaan SPI secara terus menerus setiap hasil temuan belum tentu dapat mendeteksi kecurangan dalam proses akuntansi, sehingga menyebabkan bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi tersebut menjadi tidak relevan. Dengan demikian SPI tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya dinilai dari efektifitas pengendalian intern saja, sehingga aparatur pemerintah harus mampu memenuhi aspek-aspek lain untuk menghasilkan laporan keuangan yang dinilai berkualitas. Aspek-aspek tersebut diantaranya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siahaan dan Simanjuntak (2020), Ikyarti dan Aprila (2019), serta Lynda, dkk. (2019) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memiliki nilai koefisien sebesar -0,004 (negatif) dan nilai signifikansi sebesar 0,984 lebih besar dari α 0,05 ($0,984 > 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLK). Ini berarti menolak hipotesis ketiga (H3). Dalam hasil pengujian menunjukkan bahwasannya responden memberi jawaban yang besar pada variabel SAKD, yang artinya pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Di Kabupaten Gianyar telah menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah secara terstruktur dalam menyusun laporan keuangan. Namun, hal ini bertolak belakang dengan hasil studi yang membuktikan SAKD tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan, hal tersebut mengindikasikan walaupun dalam penyusunan laporan keuangan sudah baik namun bukan menjadi tolak ukur untuk menentukan baik atau buruknya kualitas laporan keuangan, namun berdasarkan jawaban kuisioner masih terjadi pencatatan yang dilakukan secara tidak kronologis, hal tersebut juga dapat memengaruhi kualitas dari kualitas laporan karena apabila semua komponen-komponen dilakukan dengan baik maka hal tersebut mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gustina (2020), Jauhari, dkk. (2021), Vidyasari dan Suryono (2021) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan (TP) memiliki nilai koefisien sebesar -0,165 (negatif) dan nilai signifikansi sebesar 0,364 lebih besar dari α 0,05 ($0,364 > 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial Tingkat Pendidikan (TP) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLK). Ini berarti menolak hipotesis keempat (H4). Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah disebabkan karena tidak semua

pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, paham dan bisa menyelesaikan permasalahan dalam laporan keuangan daerah dan program yang diberikan oleh lembaga tidak selalu dapat memperbaiki kinerja yang buruk terhadap pegawai (Yulianingsih, dkk, 2021). Sehingga belum mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Yulianingsih, dkk (2021) namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh, dkk. (2022) dan Sukriani, dkk. (2022) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Pengalaman terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengalaman (P) memiliki nilai koefisien sebesar -0,046 (negatif) dan nilai signifikansi sebesar 0,693 lebih besar dari α 0,05 ($0,693 > 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pengalaman (P) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLK). Ini berarti menolak hipotesis kelima (H5). Pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah disebabkan karena tidak semua pegawai yang memiliki pengalaman yang lama, paham dan bisa menyelesaikan permasalahan dalam laporan keuangan (Yulianingsih, dkk, 2021). Hal ini disebabkan karena kompleksnya sistem yang digunakan dan kurangnya pelatihan yang dilakukan kepada staff yang bekerja. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Yulianingsih, dkk (2021) namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukriani, dkk. (2018) dan Maulid, dkk. (2022) yang menyatakan bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

SIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLK), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLK), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLK), Tingkat Pendidikan (TP) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLK), dan Pengalaman (P) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLK).

Keterbatasan dari penelitian ini yaitu berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini yaitu variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan 72,9% pengaruh variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, 27,1% sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Usulan penelitian ini ditujukan bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut saran yaitu penelitian selanjutnya dapat menambahkan faktor-faktor lain sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif terhadap variabel-variabel yang mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Rizka Nur. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus : BPKD Provinsi Dki Jakarta). *Skripsi Thesis*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Alfa, Yohana Piradisna Alfica Ayuni. (2022). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur. *Skripsi*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Angelicca, Maya. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap

- Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Ardianto, Rama dan Eforis, Chermian (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Wilayah Kabupaten Tangerang). *Jurnal Bina Akuntansi*. Universitas Multimedia Nusantara. Vol. 6 No. 1, Hal : 95-136.
- Baturante, Nurafni., Kamase, Jeni., dan Aprila, Nila. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitaslaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal Of Management & Business*. Universitas Muslim Indonesia. Vol. 1 No. 2, Hal : 117-127.
- Budiono, Vinne Shabrina., Muchlis dan Masri, Indah. (2018). Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan, Pengalaman Kerja Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Depok). *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*. Universitas Pancasila. Vol. 13 No. 2, Hal : 110-128.
- Binawati, Enita., Nindyaningsih, Cyrenia Tri. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Dinas-Dinas SKPD di Kabupaten Klaten). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Aktual*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solusi Bisnis Indonesia. Vol. 19 No. 1 Hal : 19-39, Maret 2022.
- Fauziyah, Euis Mardiyatul. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Serang). *Jurnal Riset Akuntansi*. Universitas Sultan Ageng Tritayasa. Vol. 04 No. 02, Hal : 196-209, Oktober 2019.
- Gustina, Ira. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Universitas Islam Indragiri Tembilahan. Vol. 10, No. 1, Hal : 56-64, Januari-Juni 2021.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikyarti, Tri dan Aprila, Nila. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Bengkulu. Vol. 9, No. 2, Hal : 131-140.
- Indrayani, Kartika Dwi. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Volume 4, Nomor 1, Hal : 1-16, Juli 2020.

- Jauhari, Hadi., Hazisma, Suhairi., Dewata, Evada. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi*, Volume 8, Nomor 1, Hal : 104-121, Januari 2021.
- Kuntadi, Cris., Saragi, Juniarty Erika Magdalena dan Syafira, Syasi Ikhilami. (2018). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*. Volume 3, Issue 5, Hal : 458-468.
- Lynda. Asnawi, Dr. Meinarni., dan Pangayow, Bill J. C. (2018). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Penelitian Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang). *Jurnal Akuntansi Audit & Aset*. Universitas Cenderawasih. Volume 2, Nomor 2, Hal : 18-38.
- Maghfiroh, Lailatul., Askandar, Noor Shodiq., dan Junaidi. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Desa Se-Kecamatan Purwosari. *E-JRA Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*. Universitas Islam Malang. Vol. 11 No. 03, Hal : 46-55, Agustus 2022.
- Maulid, Muhammad Randa., Linda., Batara, Gamal., dan Fuadi, Raida. (2022). Pengaruh Sistem Pelaporan Keuangan, Pendidikan dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Universitas Syiah Kuala Aceh. Vol. 15 (1), Hal : 97-112.
- Muthaher, Osmad. (2019). Government Accounting Standard, Human Capacity, Internal Control System and Financial Supervision As A Quality Analysis Of Government Financial Statements. *Fokus Ekonomi : Jurnal Ilmiah Ekonomi*, Volume 14, Nomor 1, Hal : 186–200.
- Peraturan Bupati Gianyar. 2016. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar. Perbup Nomor 92 Tahun 2016.
- Peraturan Bupati Gianyar. 2019. Rencana Strategis Perangkat Daerah. Perbup Nomor 22 Tahun 2019.
- Peraturan Pemerintah. 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. PP Nomor 60 Tahun 2008.
- Peraturan Pemerintah. 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan. PP Nomor 71 Tahun 2010.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). 2006. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
- Puspita, Ida Ayu Made Dwi. 2023. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Tingkat Pengalaman Kerja Dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada ODP Kabupaten Gianyar). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Putri, I Gusti Ayu Pradnya. (2021). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Tingkat Pendidikan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Koperasi Di Kabupaten Gianyar). *Skripsi*, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Said dan Noch. (2018). Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Studi pada Pemerintah Provinsi Papua). *The Journal of Business and Management Research*. Volume 1,

Nomor 1, Hal : 64–73.

- Sari, Maya. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Siahaan, Septony B. dan Simanjuntak, Arthur. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara). *Jurnal Manajemen. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, LMII Medan*. Volume 6 Nomor 2, Hal : 129-138.
- Sukriani, Luh., Dewi, Putu Eka Dianita Marvilianti., dan Wahyuni, Made Arie. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan, Dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bumdes Di Kecamatan Negara. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*. Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 9 No. 3, Hal : 85-97.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Della Suryantini, N. P., Suryandari, N. N. A., & Arie, A. A. P. G. B. (2022). Pengaruh Batasan Waktu Audit, Pengetahuan, Independensi, Due Professional Care, Pengalaman Terhadap Kualitas Audit Pada KAP Di Bali. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 2(1), 2205-2215.
- Triwardana, Dhedy. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Online Mahasiswa*. Universitas Riau. Volume 4 Nomor 1, Hal : 641-655.
- Vidyasari, Febriana Nafi'ah dan Suryono, Bambang. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Volume 10, Nomor 4, April 2021.
- Wiranto, Adi. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Komitmen Organisasi, Pengendalian Internal Akuntansi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. *Skripsi*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Yulianingsih, N. P. A., Suryandari, N. N. A., & Putra, G. B. B. (2021). Pengaruh Etika Kepemimpinan, Fungsi Badan Pengawas, Pendidikan, Pengalaman Kerja Dan Tingkat Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(5), 1758-1765.